

Bulan :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tahun :

2 0 1 9



Subbagian Humas dan TU Kalan
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Tanggal :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Media :

Halaman :

Kompas Kalteng Pos Borneo News
Palangka Post Tabengan

Negara Rugi

Rp 2,7 Miliar

Sidang Dugaan Tipikor Pasar Handep Hapakat

PALANGKA RAYA, PPOST

Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pembangunan Pasar Handep Hapakat di Kabupaten Pulang Pisau kembali bergulir di Pengadilan Tipikor Palangka Raya, Selasa (15/10). Dalam persidangan, hadir lima terdakwa Fery Niagara, maulydia aryas, Fitriadie, H Fauzi Tambang dan Haji Yasmun. Mereka didampingi oleh masing-masing kuasa hukum.

Satu per satu fakta persidangan diungkap terkait pembangunan pasar yang dianggarkan tahun 2016. Tepatnya program dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) dengan nama pengembangan kapasitas logistik perdagangan dan sarana perdagangan.

Sidang yang dipimpin hakim Alfons dimulai dari Pukul

10.00 WIB dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli, Andi Rahmat Jumaidi terkait dengan perhitungan kerugian negara. Saksi ahli yang didatangkan oleh Polres Pulang Pisau dari BPK RI menyebutkan bahwa kerugian Negara mencapai Rp 2,7 miliar lebih.

"Berdasarkan perhitungan

dan data-data yang selama tiga bulan kerugian negara bersih adalah Rp 2,7 miliar lebih atas korupsi yang dilakukan pada pembangunan pasar tersebut," ujar Andi.

Saat persidangan tersebut berlangsung, terjadi perdebatan yang cukup panjang pada mana masing-masing terdakwa. Mereka mengemu-

kakan perhitungannya masing-masing terkait dengan proyek dan kerugian negara tersebut.

"Pada waktu itu diajak ke Kantor BPK, di dalam ruangan itu saya hanya ditanya seputar data pribadi. Tidak ada memberikan keterangan lain, terkait jumlah dan keterangan bukan dari saya," ucap terdakwa Fery. Sementara itu, JPU Kiki In-

drawan mengatakan, pada intinya ahli telah menyampaikan pendapat dan akan dijadikan pertimbangan terkait dengan berapa besar kerugian negara.

"Ini akan jadi pertimbangan untuk kami. Pada intinya ada persamaan dan selisih, sehingga kerugian negara tetap ada, yang menyebabkan selisih," ucapnya. (mg8/p6)